

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	1
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	.....
Media Online	Tribun News Jateng

Wilayah: Kabupaten Purbalingga

## Kejari Temukan Dugaan Korupsi Pengelolaan APBD Senilai Rp 334 Juta di Kantor Kecamatan Purbalingga

<https://jateng.tribunnews.com/2021/03/12/kejari-temukan-dugaan-korupsi-pengelolaan-apbd-senilai-rp-334-juta-di-kantor-kecamatan-purbalingga?page=all>

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Kejaksaan Negeri Purbalingga menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD di kantor Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

Tim penyelidik kejari setidaknya menemukan anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terkait pengelolannya senilai Rp 334 juta.

Berdasarkan beberapa fakta yang dihimpun tim Kejari, ditemukan pola pengelolaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.

"Pengelolaan tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya mengelola, kemudian pertanggungjawabannya juga dalam bentuk rekayasa, atau fiktif.

Penyalahgunaan APBD sejak 2017 sampai 2020," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, Syaifudin kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (12/3/2021).

Temuan dugaan tindak pidana korupsi ini adalah berdasarkan adanya laporan masyarakat melalui pengaduan secara online, di aplikasi layanan pengaduan masyarakat [Kejari Purbalingga](#).

Kemudian [Kejari Purbalingga](#) pada dua minggu yang lalu menugaskan tim untuk menyelidiki atas dugaan tindak pidana korupsi di Kecamatan Purbalingga tersebut.

"Hari ini 12 Maret 2021 saya tanda tangani surat perintah penyidikan.

Saksi yang diperiksa kemungkinan ada sekitar 40 orang saksi tapi bisa kurang dan bisa lebih," tambahnya.

Kajari mengatakan tahapan selanjutnya membuat jadwal pemeriksaan sejumlah saksi, jadwal penyitaan, hingga penggeladahan.

Melalui saksi-saksi dan sejumlah alat bukti itu yang akan menjadi bahan untuk menetapkan tersangka.

"Saksi-saksi itu dari kecamatan dan ada kabupaten bahkan ada dari pihak ketiga yang menjadi mitra kerja dari pihak kecamatan," ungkapnya.

Nantinya akan diketahui pula kerugian negara berapa dari dugaan tindak pidana korupsi itu.

Kajari menargetkan gambaran pasti terkait terkait kasus ini sekitar dua kali 30 hari kedepan.

Pihaknya tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi kerugian lebih besar yang juga akan bertambah.

"Dana yang diselewengkan adalah dana di luar pos gaji pegawai, yaitu anggaran operasional, pengadaan barang kebutuhan perkantoran, dan lainnya.

Akan kita dalam proses penyidikan nanti," tuturnya. (Tribunbanyumas/jti)